

Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Jamblang Sebagai Destinasi Unggulan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Teori Sistem Talcott Parsons

The Concept of Development for The Jamblang Tourism Area as Cirebon First Destination in Talcott Parsons Theory System Perspective

Nurul Chamidah^{1*}, Andri Azis Putra², Subhan¹

¹Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jalan Watubelah nomor 40 Sumber Cirebon. Kode Pos 45153, Indonesia

²Institute Agama Islam Negeri Syech Nurjati Cirebon, Jalan Perjuangan No 32 Kota Cirebon, Kode Pos 45132, Indonesia

*E-mail korespondensi: nurul.chamidah@umc.ac.id

Diterima: 13 Desember 2023 | Direvisi: 26 Juni 2024 | Disetujui: 07 Juli 2024 | Publikasi online: 12 Juli 2024

ABSTRACT

This research aims to make the concept of developing the Jamblang area into an integrated tourist destination by analyzing local potential in the form of historical, social, and cultural. This research uses exploratory descriptive methods by conducting potential and social mapping. Data collection in the form of documentation studies from the Draft Regulation of the Cirebon Regency Tourism Development Master Plan and Spatial and Regional Planning, observations and focus group discussions from across stakeholders. The results showed that the development of the Jamblang tourist area can be in the form of a combination of tourist attractions such as tourist villages, art and culture, culinary tourism and three religions. The power of narrative is built to package Jamblang Old Town which has a link between cultural history, and community creativity in the form of a creative economy. Tourism development strategy is based on the system theory of Talcott Parsons, namely. (1) Socio-economic adaptation of the community as a tourist village including attractions, amenities and readiness of people who were initially blind to tourism. (2) The achievement of the goal of area-based tourism development is to focus on the direction of the vision and mission of the development of Cirebon Regency, namely the realization of Cirebon Regency as a Religious, Cultured, Competitive and Sustainable Tourism Destination for Community Welfare. (3) Integration between sectors is the sharing of roles with stakeholders and the role of visionary regional leaders determines the success of each element of working together. (4) Management of latent patterns of area-based tourism development efforts in the form of community values and norms as well as applicable laws in Cirebon Regency.

Keywords: *key tourism area, tourism, development communication*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membuat konsep pengembangan kawasan Jamblang menjadi destinasi wisata terpadu dengan menganalisis potensi lokal berupa sejarah, sosial, dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan melakukan pemetaan potensi dan sosial. Pengumpulan data berupa studi dokumentasi dari Rancangan Peraturan Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Cirebon dan Tata Ruang dan Tata Wilayah, observasi dan *focus group discussion* dari lintas *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan kawasan wisata Jamblang dapat berupa gabungan atraksi wisata seperti desa wisata, seni dan budaya, wisata kuliner dan wisata tiga agama. Kekuatan narasi dibangun untuk mengemas Kota Tua Jamblang yang memiliki kaitan sejarah budaya, serta kreatifitas masyarakat dalam bentuk ekonomi kreatif. Strategi pembangunan pariwisata didasari pada teori sistem dari Talcott Parsons yaitu: (1) adaptasi sosial ekonomi masyarakat sebagai desa wisata meliputi atraksi, amenities serta kesiapan masyarakat yang awalnya buta wisata; (2) Pencapaian tujuan pengembangan pariwisata berbasis kawasan adalah fokus pada arah visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon yakni terwujudnya kabupaten cirebon sebagai destinasi pariwisata yang agamis, berbudaya, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. (3) Integrasi antar sektor adalah berbagi peran pada para *stakeholder* serta peran pemimpin daerah yang visioner menjadi penentu keberhasilan setiap unsur bekerja bersama. (4) Pengelolaan pola laten upaya pembangunan pariwisata berbasis kawasan berupa nilai dan norma masyarakat serta undang-undang yang berlaku di Kabupaten Cirebon.

Kata kunci: *key tourism area, pariwisata, komunikasi pembangunan*

PENDAHULUAN

Tren wisata mengalami perubahan besar dari mulai berkonsep wisata massal menjadi wisata individual yang menekankan pada wisata kebijaksanaan, pembelajaran kebudayaan baru, dan pengalaman berperan serta. Budaya saat ini telah menjadi komoditas dan pembangunan negara (Yakup, 2019; Fadli et al., 2023). Kecenderungan wisata ketimuran telah menjadi kecenderungan dunia saat ini (Yildirim & Erkilic, 2019). Indonesia menjadi salah satu negara yang diuntungkan dengan peninggalan budaya khas pengaruh dari geografis dan demografis. Semenjak tahun 2016 pariwisata menjadi harapan devisa negara ketiga dan membuka peluang pembukaan lapangan kerja yang murah dan mudah (Chamidah et al., 2021). Salah satu program pariwisata Indonesia adalah desa wisata dan *homestay* yang menampilkan keunikan dan kekhasan daerah sehingga berpotensi menjadi *homestay* terbanyak dan tervariatif di dunia (Rahma, 2020; Sabon et al., 2018).

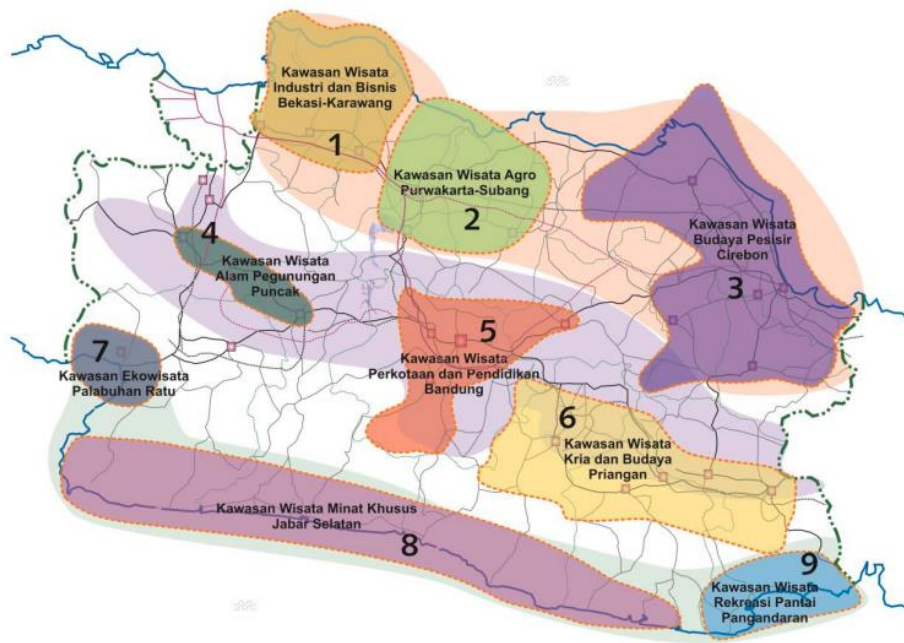
Dalam kajian pariwisata kondisi ini merujuk pada kondisi masa lalu yang berfokus pada wisata massal seperti 3S yaitu *sun* (matahari), *sand* (pasir) dan *sea* (laut). Para sarjana eropa mengkritik kondisi ini yang kemudian melahirkan konsep baru yang lebih berpihak pada masyarakat yakni pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Era baru dan pasca covid-19 kecenderungan wisatawan mulai berubah dengan memilih wisata 3L yaitu *lore* (kebijakan), *leisure* (ketenangan) dan *land* (pemandangan). Wisata saat ini juga lebih menitikberatkan pada wisata individual dan belajar mengenai pengetahuan lokal.

Pariwisata berbasis masyarakat (*communitry based tourism*) masuk dalam kajian pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable development tourism*) menekankan pada masyarakat sebagai aktor pembangunan dan kegiatan pariwisata harus memperhatikan lingkungan, menjaga keberlangsungan sosial budaya masyarakat, dan berdampak secara ekonomi yang langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri (Kurniawan, 2020; Yanes et al., 2019). Salah satu contoh pembangunan pariwisata diatas adalah desa wisata (Swesti et al., 2020; Yudistira, 2021). Desa wisata juga telah menjadi bagian program nasional lintas kementerian seperti kementerian pariwisata dan kementerian lingkungan hidup yakni program desa wisata sekaligus program kampung iklim mulai dikembangkan di berbagai desa atas dasar binaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (Fatkhullah et al., 2023; Puspitaningtyas et al., 2023).

Program pengembangan pariwisata Indonesia juga berdampak pada program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengusung tema Jabar Juara dengan menampilkan potensi pariwisata (Muhaemin, 2021; Susilowati & Kussanti, 2023). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2025 yang mengatur pembagian wilayah atau kawasan destinasi pariwisata Provinsi Jawa Barat ke dalam 5 (lima) kawasan yang disebut dengan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) salah satunya adalah destinasi Pariwisata Cirebon Raya dan sekitarnya (Aribowo et al., 2018). Peraturan ini mensasarkan pembangunan dengan modal potensi budaya ini menjadikan Cirebon Metropolitan Raya sebagai kawasan wisata budaya pesisir Cirebon yang meliputi tiga kabupaten dan satu kota yakni, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan. Cirebon memiliki kekhasan dan keunikan berbeda dengan budaya Sunda yang mendominasi Provinsi Jawa Barat.

Grand desain pembangunan pariwisata provinsi Jawa Barat tetapi tidak serta merta pemerintah daerah mempercepat langkah dan menyesuaikan program kerja sesuai dengan arah pembangunan pemerintah provinsi. Modal budaya Cirebon yang khas dan aksesibilitas menuju Cirebon berupa Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Tol Trans Jawa dan Tol Cileunyi, Sumedang dan Dawuan (Ciwumdawu) serta kereta api *double track*, tidak serta merta pemerintah Kabupaten Cirebon mampu mengambil peluang tersebut guna menjadikan pariwisata sebagai program unggulan daerah. Pariwisata masih menjadi bidang pelengkap dengan lokasi pembagian porsi anggaran kecil (Chamidah, 2021). Cirebon masih mengunggulkan pariwisata *mainstream* yakni makam Sunan Gunung Jati, Keraton Kasepuhan, situs Gua Sunyaragi dan kawasan belanja Batik Trusmi. Cirebon juga mulai dikenal dengan kuliner khas seperti empal gentong di rumah-rumah makan sepanjang jalan Panembahan Kabupaten Cirebon dan Nasi Jamblang yang berada di Kota Cirebon seperti Mang Dul dan Ibu Nur. Potensi pariwisata tersebut menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cirebon ketiga terbesar.

Saat ini pembangunan pariwisata di Cirebon adalah sektor pariwisata masih dikuasai oleh sektor privat dengan modal besar. Pemerintah belum mampu membuat dobrakan program kerja dengan menampilkan pariwisata sebagai program unggulan daerah dengan menampilkan jati diri daerah. Perlu inovasi pembangunan pariwisata yang dapat menambah lama tinggal wisatawan di Cirebon. Inovasi



Gambar 1. Kawasan Wisata Unggulan Provinsi Jawa Barat.
Sumber: Rancangan Ripparda Kabupaten Cirebon

pembangunan pariwisata juga harus memperhatikan pembangunan partisipatif masyarakat yaitu dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaksana dan bukan hanya sebagai penonton semata.

Salah satu inovasi pembangunan pariwisata yang menyertakan masyarakat adalah desa wisata. Desa wisata di Cirebon mulai tumbuh pada tahun 2016 melalui project Forum Bisnis Cirebon yang menginisiasi desa wisata Sitiwinangun. Desa wisata di Kabupaten Cirebon mengalami perkembangan pesat dari mulai 2019 atas program Desa Sejahtera Astra (DSA) di Jamblang Cirebon. Dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon menjadikan pertumbuhan desa wisata mulai tersebar di Kabupaten Cirebon hingga lahir 22 desa wisata pada tahun 2022. Pertumbuhan desa wisata ini menjadi harapan sebagai alternatif wisata dari destinasi wisata yang sudah kuat.

Persoalan pengembangan desa wisata di Kabupaten Cirebon juga disebabkan banyak faktor seperti peraturan pemerintah yang belum memasukan program desa wisata dalam struktur pembangunan lima tahunan. Hal ini menjadikan bantuan atau program binaan masih dilakukan belum massif dan berkelanjutan. Selain itu atraksi, amenitas dan aksesibilitas masih butuh perbaikan. Persoalan lain adalah jarak antar desa wisata dengan fasilitas umum seperti hotel, stasiun kereta api dan wisata besar lainnya memakan waktu perjalanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi pembangunan pariwisata yang mampu menghubungkan atraksi desa wisata dengan desa wisata lainnya sehingga waktu perjalanan wisatawan dapat dimaksimalkan.

Pariwisata merupakan program pembangunan yang paling banyak melibatkan stakeholder. Kementerian pariwisata membentuk *pentahelix stakeholder* dalam upaya optimalisasi pengembangan pariwisata untuk mendatangkan wisatawan (Chamidah et al., 2020). Pelibatan unsur *pentahelix stakeholder* yang terdiri atas lima unsur yakni Akademisi, Bisnis, Masyarakat, Pemerintah dan Media memerlukan pola komunikasi guna mencapai persamaan tujuan. Pengintegrasian antar *stakeholder* ini memerlukan kesadaran melakukan peran antar *stakeholder* dalam mewujudkan pembangunan pariwisata (Chamidah et al., 2021). Bentuk implementasi keterlibatan *pentahelix stakeholder* adalah menguatkan identitas daerah yang menjadi dasar pembangunan pariwisata di Semarang (Febriyani & Aliya, 2020). Salah satu *stakeholder* utama juga sekaligus aktor pembangunan adalah masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang mengelola desa wisata sehingga butuh berbagai keterampilan seperti keterampilan dalam berkomunikasi serta penguasaan teknologi digital (Hamdani et al., 2023).

Peran penting sektor pemerintah sebagai salah satu stakeholder menjadi *key player* yakni *stakeholder* yang memiliki derajat pengaruh dan derajat kepentingan yang paling tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi stakeholder yang memiliki peranan penting dalam pengembangan Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai penentu

kebijakan atas pengelolaan serta tanggung jawab dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat sekitar (Sarwoprasodjo & Satria, 2021). Peran *stakeholder* pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh tokoh pemimpin yang mampu merancang, melaksanakan, dan mengawal program pemerintah hingga tercapai visi pembangunan yang selaras dengan program Nawa Cita Presiden (Ramadhani, 2020). Selain keterlibatan *stakeholder* pemerintah, peran serta swasta dan keterlibatan masyarakat juga menjadi hal penting sebagaimana dalam proses pembangunan pariwisata di pulau Madura (Arifin et al., 2022).

Dalam tinjauan komunikasi pembangunan partisipatif memposisikan peranan komunikasi dalam pembangunan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif dalam seluruh proses yang disebut partisipatif. Sudut pandang komunikasi pembangunan partisipatif mensyaratkan kerelaan dari pihak pemerintah, lembaga donor, pihak-pihak lain dalam kegiatan pembangunan. Inovasi pariwisata berbasis kawasan ini berusaha menjawab persoalan Masyarakat yang secara mandiri membangun potensi desa serta bekerjasama dengan *stakeholder* pembangunan lainnya. Keberhasilan pembangunan pariwisata ini juga didasari atas keterlibatan stakeholder. Keterlibatan lintas sektor dan stakeholder membutuhkan keseimbangan agar sistem dapat terus berjalan. Sebagaimana dalam konsep teori sistem dimana struktur dan fungsi masyarakat bergerak menuju keseimbangan/*equilibrium*. Penelitian dengan objek pariwisata yang menggunakan perspektif teori sistem dari Talcott Parsons dengan penerapan *Adaptation, Goal Attainment, Integration* dan *Latency* (AGIL) pasca terjadinya COVID-19 sehingga membutuhkan strategi khusus untuk pemulihan kembali (Irvan et al., 2023; Umam et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan beberapa rumusan masalah yang terangkum dalam pertanyaan bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengembangkan pariwisata berbasis kawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan stakeholder lainnya? Apa saja faktor penghambat pengembangan desa wisata di Kabupaten Cirebon yang relevan dengan solusi tertentu? Bagaimana konsep pembangunan pariwisata berbasis kawasan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan di Cirebon? dan bagaimana implementasi teori sistem Talcott Parsons dalam pengembangan pariwisata berbasis kawasan di Kabupaten Cirebon? Rumusan masalah ini sekaligus akan mengarahkan penelitian untuk menganalisis konsep pembangunan pariwisata berbasis kawasan sebagai inovasi pembangunan pariwisata daerah dengan keterlibatan aktif dari masyarakat serta strategi pembangunan dengan menerapkan teori sistem dari Talcott Parsons.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan eksploratif kualitatif dengan tujuan memperdalam pengetahuan dan menggali ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu dan merumuskan masalah lebih terperinci (Permana, 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini mengembangkan rancangan peraturan daerah atas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Raperriparda) dan merujuk pada dokumen pembangunan berdasarkan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Cirebon. Hasil raperriparda menghasilkan 61 titik destinasi dengan klasifikasi wisata rintisan, pembangunan dan pengembangan. Destinasi meliputi situs, wisata alam, buatan dan kreativitas manusia. Raperriparda juga membuat kawasan wisata dengan tema khusus. Salah satu kawasan wisata adalah Kawasan Weru, Jamblang dan Klangeran yang merupakan kawasan kerajinan, budaya dan kuliner. Atas dasar rancangan tersebut penelitian ini mencoba mendalami konsep kawasan baru yang memfokuskan pada satu kawasan yakni Kecamatan Jamblang, Depok dan Klangeran dengan tema Kota Tua Jamblang. Tahap pengumpulan data lainnya adalah dengan melakukan wawancara kepada enam narasumber yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan serta ahli cagar budaya. Tahap pengumpulan data diakhiri dengan *focus group discussion* dengan para narasumber dari para *stakeholder* yaitu pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) (Afiyanti, 2008), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Cipta Karya (DCK), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Camat Jamblang, Klangeran dan Weru; Akademisi seperti ahli cagar budaya Kabupaten Cirebon, dan tokoh masyarakat. Para narasumber tersebut diambil dari kepakaran yang sesuai dengan destinasi utama di Jamblang, para *stakeholder* dari pemerintah berkaitan dengan kebijakan serta program kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan serta akademisi yang mampu mengawal ketercapaian implementasi konsep melalui program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan FGD bertempat di kantor Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan dilakukan selama rentang waktu

enam bulan terhitung mulai bulan April hingga Agustus 2022. Analisis data menggunakan Miles dan Huberman (1994) dengan cara pemadatan data, penampilan data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan (Sarosa, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan potensi budaya Jamblang, Cirebon

Cirebon berada dalam wilayah administratif Kabupaten dan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Cirebon merupakan wilayah paling timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Cirebon menjadi wilayah strategis sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara bagi masyarakat di bagian tengah dan timur pulau Jawa. Kestrategisan wilayah ini sudah ada semenjak abad ke 14 saat Cirebon menjadi pelabuhan internasional saat Cirebon masih menjadi pedukuhan dibawah kekuasaan Kerajaan Padjadjaran. Cirebon menjadi tempat terjadinya akulturasi budaya yang kuat antara budaya Tionghoa, India, Persia, Kolonial, Jawa dan Sunda hingga membentuk satu kesatuan sendiri bernama Cirebon. Akulturasi tersebut membuat produk budaya berupa benda dan tak benda seperti berupa tarian, kesenian, kuliner dan bangunan yang terjaga hingga saat ini. Hal inilah yang menjadi potensi bahkan bisa dikatakan kekayaan tak ternilai bagi sebuah daerah.

Secara historis Jamblang merupakan sebuah kawasan sosial budaya yang awalnya sebagai benteng pertahanan, pusat perekonomian dan penyebaran agama Islam di wilayah barat Keraton Cirebon oleh oleh Sunan Gunung Jati. Sebaran perekonomian ini merambah jauh hingga 20 kilometer sampai berbatasan dengan Indramayu dan Majalengka. Jamblang menjadi wilayah yang mempertemukan semua etnis masyarakat. Saat pemerintahan Belanda berkuasa dengan dibangunnya jalan pos dan pendirian pabrik sepiritus dan arak di Palimanan, para keturunan Belanda membuat perumahan yang tersebar mulai dari wilayah Plumbon hingga Klangeran. Hal ini terbukti banyaknya peninggalan rumah tua bergaya Kolonial, Tionghoa dan Jawa yang masih terawat hingga saat ini. Kini Jamblang secara administratif menjadi kecamatan dengan 8 desa terpisah dari Kecamatan Klangeran pada tahun 1980. Pedaran wilayah Jamblang sendiri berada di tiga kecamatan yaitu Depok, Jamblang dan Klangeran. Landasan historikal tersebut menjadi awal pengembangan konsep kawasan wisata dan tema khusus wisata Jamblang tentang keragaman budaya, etnis, peninggalan arsitektur dan produk kreatif masyarakat.

Konsep Pengembangan Kawasan Jamblang

Pembangunan pariwisata di Cirebon dapat dimulai dengan menggunakan pendekatan model pariwisata yang paling sederhana yaitu sistem pariwisata dengan pelibatan empat unsur yaitu wisatawan (*tourist*), daerah asal wisatawan (*tourist generating region*), destinasi pariwisata (*tourist destination region*), dan wilayah antara (*transit route*) (Rahmawati & Sungkono, 2016). Rute merupakan komponen transportasi yang paling utama dalam industri pariwisata (Leiper, 1979). Kemudian dalam rangka pembangunan ekonomi, rute yang juga berfungsi untuk meningkatkan persebaran wisatawan ke destinasi-destinasi



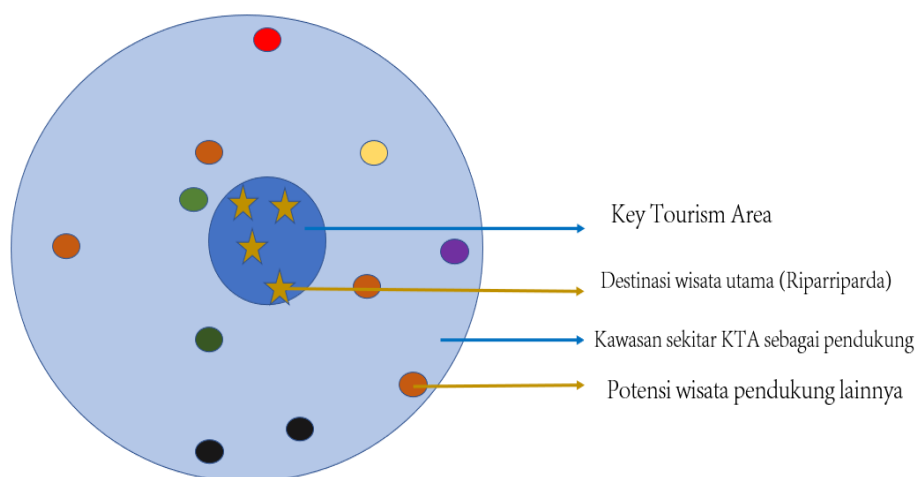
Gambar 2. Sebaran destinasi wisata di raperriparda. Sumber: *Google map* dan diolah oleh peneliti

marjinal dapat menawarkan sejumlah peluang diantaranya: 1) pengembangan usaha; 2) kesempatan kerja dan penghasilan; 3) penghasilan kolektif; 4) konservasi alam dan budaya; 5) pembangunan kapasitas; dan 6) pembangunan infrastruktur.

Merujuk pada Rancangan Peraturan RIPPARDA bahwa destinasi wisata di Kecamatan Jamblang hanya ada dua yaitu Kota Tua Jamblang dan Masjid Kuno Kebagusan. Sementara jika dianalisis dari jarak spasial, destinasi wisata terdekat adalah Masjid Kuno Depok di Kecamatan Depok dan petilasan Nyi Endang Geulis di Kecamatan Klagenan. Penjelasan mengenai keempat destinasi tersebut diuraikan dalam Gambar 2 (halaman 27).

Gambar 2 menguraikan empat destinasi yang masih dalam satu kawasan imajiner Jamblang. Dari empat destinasi tersebut menjadi titik utama kemudian terpilih Kota Tua Jamblang sebagai *key tourism area* dan destinasi lainnya sebagai wisata pendukung. Pengembangan destinasi tersebut dihasilkan beberapa destinasi pendukung berupa desa wisata, sentra belanja, sanggar seni, area terbuka dan beberapa situs. Kumpulan potensi wisata inilah yang menjadi kawasan wisata Jamblang.

Dengan adanya kawasan wisata maka akan terbentuk pola dan rute sebagai penghubung antara daerah asal dan destinasi wisata selama melakukan perjalanan wisata. Pariwisata berbasis kawasan mengumpulkan desa wisata, wisata belanja, wisata kuliner situs dan bangunan sejarah dalam kemasan wisata terintegrasi berbasis masyarakat sehingga menjadi destinasi wisata yang menjadikan wisatawan habis waktu dalam satu lokasi. Dalam pandangan (Leiper, 1979) perjalanan yang dilakukan wisatawan tidak hanya berupa perjalanan langsung dari daerah asal menuju daerah tujuan wisata, melainkan ada rute dan titik-titik lain sebagai tempat transit atau pemberhentian sementara (Ardiyansari et al., 2019). Pemikiran ini telah menempatkan perjalanan wisata sebagai bentuk perjalanan yang dinamis.



Gambar 3. Konsep pengembangan pariwisata berbasis kawasan. Sumber: desain peneliti

Hasil observasi yang dilakukan terhadap destinasi wilayah empat destinasi yang tercantum Raperriparda tersebut diperoleh data potensi atraksi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru guna mendukung atraksi utama berdasarkan spasial wilayah.

Dari pemetaan potensi wisata diatas maka dapat digambarkan sebaran potensi destinasi wisata yang menjadi modal atraksi kawasan wisata Jamblang. Potensi tersebut perlu pengemasan dan edukasi hospitality kepada masyarakat setempat. Potensi tersebut juga perlu dilengkapi dengan amenitas pendukung wisata seperti lahan parkir, toilet dan tempat sholat, serta titik kumpul bagi pengunjung. Atraksi wisata juga dapat berupa spot *selfie* untuk dapat diunggah dan dibagikan oleh wisatawan di akun media sosial mereka. Spot *selfie* dengan konsep *instagramable* menjadi keharusan bagi generasi milenial serta menjadi ajang promosi wisata secara cepat, mudah dan murah (Alifah, 2022; Fitriani et al., 2019; Putri & Sugiarti, 2021; Sahabudin et al., 2020).

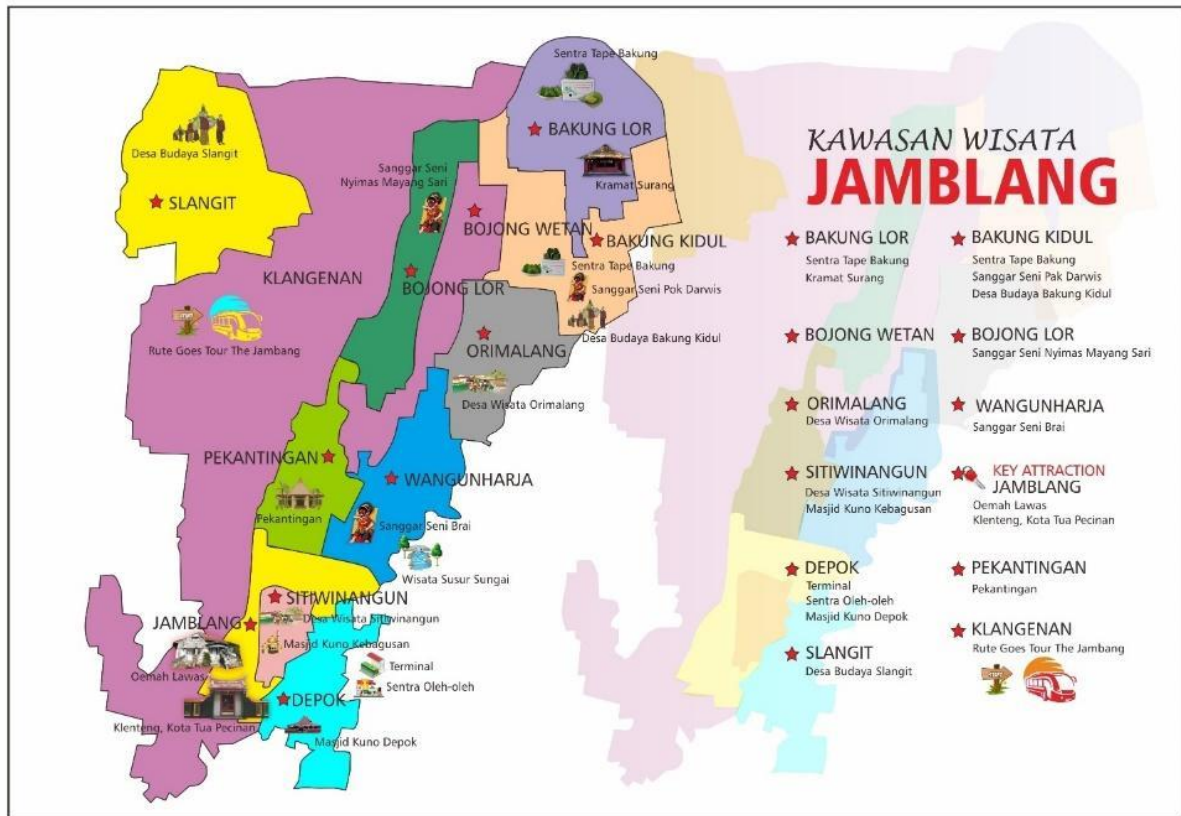
Aspek aspek lain yang diperlukan dalam menghubungkan antar atraksi adalah kemampuan mengemas paket wisata. Kombinasi atraksi diperlukan agar variasi wisata tidak membuat jenuh wisatawan dengan atraksi yang monoton. Alternatif atraksi kawasan wisata dapat berupa edukasi Sejarah, kuliner dan sanggar seni. Konsep ini sebagaimana yang dilakukan di kawasan wisata Jeep Kaliurang, Sleman

Tabel 1. Potensi Pengembangan Kawasan Wisata Jamblang

No	Atraksi	Karakteristik pengembangan	Uraian
1.	Vihara Dharma Rakhita	Bangunan religi	Berlokasi di Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang. Bangunan ini sebagai salah satu cagar budaya di Cirebon.
2.	Desa wisata gerabah Sitiwinangun	Desa Wisata	Desa wisata gerabah Sitiwinangun yang memiliki indikasi geografis pembuatan gerabah dari 800 tahun yang lalu. Desa wisata Sitiwinangun merupakan desa wisata pertama di Kabupaten Cirebon berlokasi di Kecamatan Jamblang.
3.	Desa wisata Kesugengan Lor	Desa Wisata	Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok berlokasi di sebarang sungai Jamblang dan menjadi dapur nasi Jamblang dari dulu hingga saat ini. Secara spasial masih dalam kesatuan kawasan Jamblang. Desa Kasugengan lor dapat menjadi desa wisata dengan potensi kuliner Nasi Jamblang sajian khas Cirebon.
4.	Desa Budaya Slangit	Desa Budaya	Desa Slangit berada di wilayah administratif Kecamatan Klangeran. Daerah ini sebagai sentra kerajinan kesenian berupa topeng dan lukisan kaca. Selain itu memiliki banyak sanggar seni dan maestro penari topeng. Desa Slangit dapat berpotensi menjadi desa budaya.
5.	Oemah Lawas	Bangunan	Bangunan bergaya kolonial yang terawat dengan baik oleh pemiliknya. Halaman depan <i>oemah lawas</i> ini terdapat kafe yang difungsikan sebagai Sanggar Seni Klabang yang merupakan akronim dari Klangeran-Jamblang. Sanggar ini menjadi ajang kesenian khas Cirebon seperti seni tari topeng, gamelan dan seni pentas lainnya.
6.	Sanggar Seni Cipta Bagus Winangun	Sanggar seni	Sanggar seni yang dikelola oleh para pemuda Desa Sitiwinangun yang menampilkan kesenian Cirebon seperti sintren, tari topeng, berokan dan lainnya.
7.	Sanggar seni pokdarwis	Sanggar seni	Berlokasi di Desa Bakung Kidul yang melestarikan kesenian Brai di Cirebon. Masyarakat ini juga masih melakukan aneka ritual budaya mulai dari kelahiran hingga kematian.
8.	Sanggar seni Nyi Mayang Sari Desa Bojong	Sanggar seni	Sanggar seni tari klasik Cirebon dan modifikasi berlokasi di Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang.
9.	Sanggar Seni Brai Wangunharja	Sanggar seni	Salah satu kesenian khas Cirebon yaitu Brai. Seni sholat dengan kearifan lokal khas Cirebon yang hampir punah namun masih terus dijaga oleh sanggar seni Wangunharja ini.
10.	Sentra produk olahan tape ketan Bakung	UMKM	Tape ketan khas Cirebon yang menjadi oleh oleh diproduksi di Desa Bakung Lor dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang. Beberapa modifikasi berasal dari tape ini sudah mulai bisa dinikmati sebagai pilihan oleh-oleh dari produk tape.
11.	Sentra Pengrajin mainan anak-anak dari limbah bekas	UMKM	Kreativitas masyarakat Desa Jamblang adalah salah satunya kerajinan limbah bekas untuk mainan anak-anak. Seperti perahu otok-otok, peralatan dapur mini, terompet kertas dan lainnya.
12.	<i>Goes tour the</i> Jamblang	Alam	Potensi wisata berupa rute <i>goes</i> sepeda ontel untuk mengunjungi desa-desa di Jamblang dengan pemandangan hamparan sawah dan Gunung Ciremai.
13.	Susur Sungai	Alam	Potensi wisata Susur sungai Jamblang yang merupakan napak tilas Laksamana Cheng Ho dari Jamblang hingga muara sungai Bondet.

Yogyakarta, yang melakukan pembagian paket wisata ke sejumlah atraksi dengan menekankan pada sirkulasi wisatawan dan rute wisata (Asri Aprianti Sangadji & Basuki, 2021; Sangadji & Basuki, 2021).

Kawasan wisata merupakan upaya pengintegrasian potensi lokal menjadi atraksi wisata sebagai pendukung *key tourism area*. Konsep ini menjadi kekuatan wisata guna memenuhi kebutuhan wisatawan dalam satu lokasi yang memiliki kedekatan *spasial* dan fungsi. Dengan adanya konsep kawasan wisata menjadikan wisatawan yang datang memiliki alternatif wisata pendukung lainnya dalam satu rute destinasi. Konsep kawasan wisata tersebut terdiri dari tiga kecamatan meliputi 12 desa. Sebaran potensi kawasan wisata Jamblang ditampilkan pada Gambar 4 (halaman 30).



Gambar 4. Konsep Sebaran Atraksi di Kawasan Wisata Jamblang. Sumber: *google map* dan diolah oleh peneliti 2022

Program Pengembangan Kawasan Kota Tua Jamblang

Hasil analisis menunjukkan potensi kawasan wisata Jamblang dapat dikemas dalam bentuk-bentuk wisata sebagai berikut.

Wisata Tiga Agama. Jamblang memiliki potensi berupa peninggalan rumah ibadah yang terawat hingga saat ini dalam satu kawasan. Hal ini menjadi nilai berharga dan modal pengembangan wisata religi tiga agama yaitu Islam, Konghucu dan Kristen. Tiga agama tersebut ditampilkan dalam bangunan rumah ibadah yang bernilai cagar budaya yang dilindungi dan terjaga. Hubungan sosial kemasyarakatan antar umat beragama yang rukun hidup berdampingan. Ritual agama masih dilakukan hingga saat ini. Selain itu wisata ziarah Agama Islam juga dapat dilakukan di Masjid Kuno Kebagusan, Masjid Kuno Depok dan petilasan Nyi Mas Endang Geulis Klagenan. Upaya pengembangan wisata religi ini dapat dikemas dalam bentuk wisata edukasi dengan dipandu oleh pemandu wisata profesional.

Wisata Kota Tua Jamblang. Jamblang memiliki kawasan pecinan yang menjadi pusat ekonomi etnis Tionghoa. Desain bangunan memiliki tiga gaya seperti pecinan, kolonial dan Jawa. Bangunan yang masih utuh dan menjadi rumah tinggal perseorangan. Beberapa bangunan sudah dialihfungsikan sebagai gudang, rumah sarang burung walet dan kelelawar serta ada pula yang rusak tidak terawat. Bangunan ini dapat difungsikan sebagai rumah show atau destinasi jelajah rumah Tionghoa yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mempelajari desain tata ruang gaya Tionghoa yang masih terpelihara atau gaya kolonial dengan aksen bangunan yang terawat. Bangunan ini juga dapat menjadi kafe dengan pentas seni *indoor*. Bangunan kawasan pecinan dapat menjadi *spot selfie* dan pedestrian yang bersih dan indah.

Desa Wisata dan Homestay. Jamblang dapat berpotensi sebagai desa wisata yang menampilkan keaslian keseharian masyarakat petani Cirebon. Desa wisata ini menampilkan atraksi kehidupan masyarakat petani pantai utara Cirebon. Beberapa desa wisata yang dapat dikembangkan adalah desa wisata Jamblang, Desa Wisata Sitalwinangun, Orimalang, Bojong Lor, Bakung Lor, Bakung Kidul, Kasugengan Lor. Di masa mendatang Desa Wisata menjadi harapan *homestay* sebagai bentuk amenities bagi wisatawan yang berkunjung dan menginap di Kota Tua Jamblang.

Wisata Seni dan Budaya. Jamblang masih kuat dalam pengembangan seni dan budaya. Beberapa diantaranya adalah keberadaan sanggar-sanggar seni yang menampilkan tarian, seni musik, pertunjukan

khlas Cirebon. Ritual budaya seperti *ngunjung buyut*, *mider desa*, upacara kelahiran dan kematian, sedekah bumi dan lainnya masih terus dilakukan hingga saat ini. Desa Slangit Kecamatan Klagenan juga dapat diproyeksikan sebagai desa budaya. Desa ini dikenal sebagai desa yang memiliki sanggar seni yang aktif melestarikan kesenian Cirebon seperti tari topeng dan lukisan kaca.

Wisata Belanja dan Kuliner. Data menunjukkan Kawasan Jamblang memiliki usaha mikro kecil dan menengah atau industri rumahan yang berasal dari tangan-tangan kreatif. Kerajinan seperti mainan anak-anak dari barang bekas, kerajinan limbah ban bekas, gerabah Sitiwinangun, kuliner nasi Jamblang, olahan ikan Wangunharja, kue ketan, tape beras ketan, kue khas pecinan dan lainnya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sentra belanja oleh-oleh khas Jamblang sebagai cinderamata.

Pengembangan Kawasan Wisata Kota Tua Jamblang dalam perspektif Teori Sistem

Teori sistem ini membahas bagaimana masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*/keseimbangan. Kehidupan sosial masyarakat sebagai sistem yang harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian atau unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan saling memengaruhi dalam satu kesatuan (Bakhri & Fibrianto, 2018; Pace & Faules, 2010). Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan batas dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol variasi lingkungan, dan kontrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam (Wirawan, 2012). Hal pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut (Ritzer, 2003), terdapat 4 (empat) kebutuhan fungsional dasar yang dijalankan sistem sosial di masyarakat agar terus berjalan, antara lain yang disingkat dalam AGIL yaitu Adaptasi (*adaptation*), Pencapaian tujuan (*goal attainment*), Integrasi (*integration*) Pemeliharaan pola laten (*latency pattern maintenance*).

Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan batas dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol variasi lingkungan, dan kontrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam. Hal pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut terdapat 4 (empat) kebutuhan fungsional dasar yang dijalankan sistem sosial di masyarakat agar terus berjalan (Parsons, 2013). Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengembangan pariwisata berbasis kawasan Kota Tua Jamblang berdasarkan Teori Sistem, yaitu:

Pertama, *Adaptasi (adaptation)*. Sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Parson menjelaskan fungsi adaptasi sebagai sistem tindakan yang bertujuan untuk menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang menjadikan sektor pariwisata hanya sebagai pelengkap dan belum menjadikan pariwisata sebagai program unggulan. Perlunya merubah *mindset* pemerintahan dan masyarakat untuk sadar wisata. Begitu pun dengan masyarakat, adaptasi perubahan dari masyarakat petani, pekerja dan pengusaha UMKM beradaptasi menjadi masyarakat pariwisata. Pengelolaan dan manajemen wisata perlu upaya keras untuk dipelajari, baik oleh para aktor masyarakat, para penggerak dan pelaku usaha wisata hingga pada masyarakat kawasan wisata Cirebon itu sendiri, khususnya internalisasi pemahaman *sapta pesona* yang perlu dikuatkan.

Selain adaptasi pada tataran masyarakat, adaptasi pembangunan fisik juga perlu ditingkatkan seperti aksesibilitas dan amenitas kawasan wisata. Perubahan amenitas wisata tidak bisa disamakan dengan amenitas umumnya, sebagai contoh lampu penerangan jalan harus disesuaikan dengan aksent khas wilayah Cirebon. Adaptasi lainnya yang dianggap perlu adalah adaptasi peraturan daerah yang pro terhadap pengembangan pariwisata. Sebagai contoh alokasi anggaran dinas terkait untuk pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan dan juga visi misi pembangunan daerah pengarah pada peningkatan sektor pariwisata (Syahrudin et al., 2023).

Kedua, *Pencapaian tujuan (goal attainment)*. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen utama dalam merumuskan perencanaan yang komprehensif. Kaitannya dalam pengembangan pariwisata adalah untuk menjaga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah bisa tepat mencapai tujuan perencanaan itu sendiri. Upaya menyusun strategi dan arah kebijakan juga akan mengoptimalkan kinerja pemerintah, khususnya dalam melakukan transformasi dan reformasi birokrasi. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan juga akan membantu perbaikan kinerja dan kapasitas pemerintah daerah (Lestari & Suharyanti, 2020). Oleh karena itu, asumsi akan disesuaikan dengan visi,

misi, tujuan, sasaran yang telah diusulkan dalam rancangan pariwisata Kabupaten Cirebon, yaitu visi pembangunan kepariwisataan kabupaten adalah “Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai Destinasi Pariwisata yang Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Ketiga, Integrasi (*integration*). Sistem harus mengatur hubungan antara ketiga imperatif fungsional tersebut (*adaptation, goal attainment, dan latency*); sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kawasan berfungsi untuk menetapkan fokus pengembangan dengan basis kawasan yang ada. Arah kebijakan pariwisata Kabupaten Cirebon ini dirumuskan untuk menjadi pedoman dalam mengimplementasikan pembangunan daerah yang sinergis dan berkesinambungan. Secara ideal, arah kebijakan harus sesuai dengan fokus pembangunan khususnya berkaitan dengan tema pembangunan tahunan daerah (Luongo et al., 2023).

Arah kebijakan pariwisata Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: (1) peningkatan pengawasan pariwisata berwawasan lingkungan; (2) penguatan nilai tambah sektor pendukung pariwisata; (3) penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata; (4) optimalisasi kinerja pelayanan berbasis digital; (5) peningkatan kapasitas pegawai pemerintahan di bidang pariwisata; dan (6) peningkatan kualitas para pendidik di bidang budaya

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan di atas didasarkan kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada di Rancangan Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon. Strategi dan Arah kebijakan pariwisata di atas, akan diselaraskan dengan urusan-urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib pelayanan, urusan wajib non pelayanan, dan urusan pilihan.

Hal ini juga dilakukan agar dapat memberikan rekomendasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai basis pengeluaran anggaran pariwisata. Tabel 2 menampilkan keselarasan antara sasaran, strategi, dan arah kebijakan pariwisata Kabupaten Cirebon dengan basis Rancangan Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon.

Tabel 2. Penyelarasan Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara.	Optimalisasi reformasi birokrasi untuk mencapai manajemen kepariwisataan yang baik.	Optimalisasi kinerja pelayanan berbasis digital. Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan tata kelola keuangan.
Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan di bidang pariwisata.	Peningkatan kapasitas pegawai pemerintahan di bidang pariwisata.
Meningkatnya jumlah pembangunan daya tarik wisata kabupaten.	Peningkatan ketangguhan budaya masyarakat dalam daya saing pariwisata.	Peningkatan kualitas para pendidik di bidang budaya.
Meningkatnya jumlah pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar kawasan pariwisata.	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata.
Meningkatnya jumlah pembangunan destinasi pariwisata kabupaten.		Peningkatan pengawasan pariwisata berwawasan lingkungan.
Meningkatnya jumlah lama tinggal wisatawan.	Pengembangan ekonomi kreatif.	Penguatan nilai tambah sektor pendukung pariwisata.
Meningkatnya pengeluaran wisatawan		
Meningkatnya jumlah penerimaan PAD dari sektor pariwisata.	Pengembangan ekonomi kawasan berbasis sektor pariwisata unggulan.	Optimalisasi kemudahan investasi.

Keempat, Pemeliharaan pola laten (*latency pattern maintenance*). Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut (Ritzer, 2003),. Sistem kultural menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Motivasi utama pemerintahan Gubernur Jawa Barat yang menjadikan ‘Jabar Juara’ dan mendesain kawasan

Cirebon Metropolitan Raya sebagai kawasan wisata dan budaya. Komponen tersebut harapannya bisa disandarkan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk mensukseskan program pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, sosial dan budaya masyarakat setempat (Khalid et al., 2019).

KESIMPULAN

Menjawab persoalan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis kawasan merupakan bentuk inovasi yang menggabungkan konsep spasial dan fungsi dari wilayah. Penggabungan antara *key attraction area* dengan wilayah sekitar menjadikan kawasan wisata bertema khusus. Kawasan wisata menjadi program unggulan pemerintah yang mengedepankan pada pengembangan usaha; kesempatan kerja dan penghasilan; penghasilan kolektif; konservasi alam dan budaya; pembangunan kapasitas; dan pembangunan infrastruktur. Perwujudan pariwisata berbasis kawasan yang mengutamakan masyarakat sebagai aktor pembangunan didasari dengan teori sistem dari Talcott Parson formulasi AGIL yakni Adaptasi (*adaptation*), Pencapaian tujuan (*goal attainment*), Integrasi (*integration*) dan Pengelolaan pola laten (*latent pattern maintenance*). (1) Adaptasi terdiri atas adaptasi masyarakat menuju masyarakat wisata, adaptasi terhadap amenities pembangunan pariwisata serta adaptasi aturan pemerintah yang menjadikan pariwisata sebagai program unggulan pembangunan daerah. (2) Pencapaian tujuan pengembangan pariwisata berbasis kawasan dibutuhkan visi dan misi pariwisata Kabupaten Cirebon yakni Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai Destinasi Pariwisata yang Agamis, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan inilah yang menjadi fokus arah pembangunan Kabupaten Cirebon. (3) Integrasi antar sektor pelaku pembangunan pariwisata berupaya untuk siapa melakukan apa disesuaikan dengan tugas dan fungsi para pemangku terkait. Pemimpin daerah yang visioner menjadi penentu keberhasilan setiap unsur bekerja bersama sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. (4) Pengelolaan pola laten adalah upaya pembangunan pariwisata berbasis kawasan melalui nilai, norma dan undang-undang yang berlaku di Kabupaten Cirebon.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan hasil penelitian dari dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah (bapelitbangda) Kabupaten Cirebon dengan judul penelitian Pengembangan Pariwisata Berbasis Kawasan di Kabupaten Cirebon. Terima kasih kami ucapkan kepada Divisi *Environment and Social Responsibility* (ESR) PT. Astra Internasional sebagai dasar gagasan dari pengembangan pariwisata berbasis kawasan di Jamblang dalam program Desa Sejahtera Astra (DSA) dari tahun 2019-2022. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami ucapkan terima kasih kepada *Non-Government Organization* (NGO) Grow Up Institute sebagai fasilitator dalam pengembangan desa di Cirebon serta Forum Bisnis Cirebon yaitu wadah para *sosio-entrepreneur* di Cirebon yang telah mendampingi pengembangan Jamblang sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>
- Alifah, N. (2022). Tren Foto di Era Milenial di Bangunan Peninggalan Sejarah Indonesia. *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 1(01), 1–6.
- Ardiyansari, N., Saryani, & Muhamad. (2019). Peran organisasi pemuda dalam pengembangan ekowisata kawasan mangrove guna mewujudkan ketahanan lingkungan (Studi pada keluarga pemuda pemudi Baros (KP2B) di dusun Baros, desa tirtohargo, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan N*, 25(2), 226–252.
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Dian Putra, Y. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam

- Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21>
- Arifin, S., Andiriyanto, A., & Fathurrohman. (2022). Strategi Komunikasi Pembangunan Pariwisata Madura Development Communication Strategy of Madura Tourism. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 17(2), 111–126.
- Asri Aprianti Sangadji, G., & Basuki, I. (2021). Perencanaan Trayek Angkutan Menuju Kawasan Wisata Kaliurang-Merapi di Kabupaten Sleman. *Jurnal Transportasi*, 21(2), 73–80. <https://doi.org/10.26593/jtrans.v21i2.5155.73-80>
- Bakhri, S., & Fibrianto, A. S. (2018). Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dengan Tingkat Religiusitas Siswa SMA Negeri 1 Tangen (Perspektif Teori Sistem Sosial Talcott Parsons). *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 67–84.
- Chamidah, N. (2021). *Komunikasi Aktor Pembangunan Dalam Pengembangan Desa Wisata Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon*. Universitas Gadjah Mada.
- Chamidah, N., Guntoro, B., & Sulastri, E. (2020). Marketing communication and synergy of pentahelix strategy on satisfaction and sustainable tourism. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(3), 177–190.
- Chamidah, N., Putra, A. H. P. K., Mansur, D. M., & Guntoro, B. (2021). Penta helix element synergy as an effort to develop villages tourism in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–22.
- Fadli, M., Hadiyantina, S., Cahyandari, D., Liemanto, A., & Sholehudin, M. (2023). Inquiring into the Sustainable Tourism Village Development Through the Social Complexity of Adat Peoples in Digital Era. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 181–201. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.26438>
- Fatkhullah, M., Mulyani, I., Dewi, A. S., Habib, M. A. F., & Reihan, A. (2023). Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Perubahan Iklim melalui Pelibatan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(01), 17–33.
- Febriyani, R. A., & Aliya, F. N. (2020). Komunikasi Pembangunan untuk Identitas tempat: budaya kampung di Kota Semarang. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(01), 11–29.
- Fitriani, D. R., Wulandari, C., & Ohorella, N. R. (2019). The Power Of “Instagramable” In Destination Branding: Jakarta Millennial Tourist Case Study. *Conference On Communication and News Media Studies*, 1, 328.
- Hamdani, A. T., Octavanny, V., & Aruman, A. E. (2023). Komunikasi Pokdarwis dalam Pengimplementasian Program Pengembangan Pariwisata pada Masyarakat Cirendeuh Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(02), 93–107.
- Irvan, I., Kpalet, P., & Natsir, R. A. (2023). The Role of the Village Government in Management of Tourism Objects in Gunung Sari Village, Alok District, Sikka Regency. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan*, 3(1), 1–5.
- Khalid, S., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). Community Empowerment and Sustainable Tourism Development: The Mediating Role of Community Support for Tourism. In *Sustainability*, 11(22), 6248. <https://doi.org/10.3390/su11226248>
- Kurniawan, A. R. (2020). Tantangan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada era digital di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Pangalengan). *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 2(2), 10.
- Leiper, N. (1979). The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry. *Annals of Tourism Research*, 6(4), 390–407.
- Lestari, A. A. A., & Suharyanti, N. putu N. (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(2).
- Luongo, S., Sepe, F., & Del Gaudio, G. (2023). Regional innovation systems in tourism: The role of collaboration and competition. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100148. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100148>

- Muhaemin, N. M. (2021). Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat? *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 4(1), 201–222.
- Pace, R. W., & Faules, D. F. (2010). *Komunikasi Organisasi*. Remaja Rosdakarya.
- Permana, I. P. H. (2021). Analisis Rasio Pada Akun Youtube Untuk Penelitian Kualitatif Menggunakan Metode Eksploratif. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, 15(1), 40–48.
- Puspitaningtyas, I. H., Mutahir, A., Primadata, A. P., & Kurniawan, A. (2023). Keterhubungan Program Kampung Iklim (Proklim) Dengan Proyek Desa Wisata Pandak Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2494–2500.
- Putri, D. S., & Sugiarti, D. P. (2021). Pengaruh Instagram Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Milenial Di Pantai Pandawa, Bali. *Mouth (E-WoM)*, 9(1).
- Rahma, A. A. (2020). Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1–8.
- Rahmawati, & Sungkono. (2016). *Pengembangan Desa Wisata berbasis Partisipasi Masyarakat dengan Pendekatan Creative Share Value – CSV untuk Menunjang Ketahanan Ekonomi Nasional*.
- Ramadhani, R. W. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117–129.
- Ritzer, G. (2003). *Teori Sosiologi Modern* (Edisi ke 6). Kencana.
- Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit, P. C. S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi peningkatan kinerja sektor pariwisata Indonesia pada Asean economic community. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 163–176.
- Sahabudin, A., Tahir, R., Hadian, M. S. D., Endyana, C., & Rachmat, H. (2020). Tantangan milenial di desa wisata. *Tornare*, 2(1), 1.
- Sangadji, G. A. A., & Basuki, I. (2021). Perencanaan Trayek Angkutan Menuju Kawasan Wisata Kaliurang-Merapi Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Transportasi*, 21(2), 73–80.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Sarwoprasodjo, S., & Satria, A. (2021). Strategi Komunikasi dalam Gerakan Penolakan Isu Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 19(02), 111–124.
- Susilowati, S., & Kussanti, D. P. (2023). Implementasi Slogan “Jabar Juara” Dalam City Branding Sektor Pariwisata Berbagai Kota di Jawa Barat. *Jurnal Trias Politika*, 7(1), 1–15.
- Swesti, W., Soeprihanto, J., & Widiyastuti, D. (2020). Model Pengembangan Pariwisata Kreatif untuk Mencapai Keberlanjutan di Desa Wisata Kasongan. *Jurnal Kawistara*, 10(3), 295–309.
- Syahrudin, E., Apriliani, A., Hernawan, D., & Ramdani, F. T. (2023). *Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Desa Wisata*. 2, 2184–2192.
- Umam, K., Kurniawati, E., & Widiyanto, A. A. (2022). The Dynamics of “Pokdarwis Capung Alas” in the Development of Community-based Tourism in Pujon Kidul Village during the COVID-19 Pandemic. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 43(3), 850–857.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.
- Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Yanes, A., Zielinski, S., Diaz Cano, M., & Kim, S. (2019). Community-Based Tourism in Developing Countries: A Framework for Policy Evaluation. In *Sustainability* (Vol. 11, Issue 9). <https://doi.org/10.3390/su11092506>
- Yildirim, G., & Erkilic, E. (2019). An overview of glamping tourism within the context of the Middle East tourism: The case of Turkey. *Journal of Recreation and Tourism Research*, 6(4), 475–489.

Yudistira, S. (2021). Sustainable Development Planning of Eco-Park Koto Katik Area in Padang Panjang City. *Jurnal Kawistara*, 11(3), 296–313.